

OMBUDSMAN BABEL: PEMKAB BELITUNG KEMBALI MEMPEROLEH PREDIKAT ZONA HIJAU

Kamis, 23 Februari 2023 - Agung Nugraha

Tanjung Pandan - Pemerintah Kabupaten Belitung kembali memperoleh Predikat Zona Hijau pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2022. Anggota Ombudsman RI, Johannes Widijantoro didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Belitung, Sahani Saleh bertempat di Kantor Bupati Belitung Timur, Rabu (22/2/2023).

Pada penilaian tahun 2022, secara nasional Pemkab Belitung memperoleh nilai sebesar 84,32 dengan peringkat 80 dari 415 pemerintah kabupaten. Selanjutnya terdapat 6 instansi memperoleh predikat Zona Hijau, sedangkan satunya memperoleh predikat Zona Kuning. Adapun rincian hasil masing-masing instansi meliputi Dinas Kesehatan dengan nilai 92.88, Dinas Pendidikan dengan nilai 82.41, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 84.39, Dinas Penanaman Modal dengan nilai 86.52, Dinas Sosial dengan nilai 63.71, Puskesmas Perawas dengan nilai 90.75 dan Puskesmas Tanjung Binga dengan nilai 89.61.

Johanes menyampaikan bahwa Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2022 melakukan penambahan variabel penilaian sehingga dapat mengukur kualitas layanan secara komprehensif. "Kepada Bapak Bupati semoga bisa mendapatkan peringkat 10 besar pada penilaian tahun 2023 agar nanti bisa diundang langsung ke Jakarta," ujar Johannes.

Sementara itu, Yozar menambahkan hasil pencapaian ini merupakan untuk kedua kalinya Pemkab Belitung memperoleh predikat hijau. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 87,74, meskipun ada penurunan nilai diharapkan kedepannya akan ada perbaikan kualitas layanan publik oleh Pemkab Belitung Timur.

Bupati Belitung menyampaikan terima kasih atas kunjungan Anggota Ombudsman RI beserta Ombudsman Babel dalam rangka penyerahan piagam penghargaan. "Penilaian ini sebagai salah satu indikator sejauh mana kualitas layanan kami berikan kepada masyarakat, Pemkab Belitung minta saran dan masukan agar pelayanan publik dapat diselenggarakan sebaik mungkin," ungkap Sahani.